

# STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PONTIANAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DI KOTA PONTIANAK

Oleh:  
**ARDIAN**  
NIM.E02110028

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2016

Email: [ardian\\_sidik@ymail.com](mailto:ardian_sidik@ymail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dari Samuel P. Huntington dan Joan M tentang Konsep Partisipasi politik sebagai pedoman dalam mengkaji pelaksanaan fungsi partisipasi politik yang diberikan KPU Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan tentang Strategi KPU Kota Pontianak yaitu (1) peningkatan kemampuan individual dengan cara sosialisasi ke beberapa sekolah dengan fokus kepada pemilih pemula, (2) pemahaman kekuasaan mengarah kepada kaum marginal yakni warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II A Pontianak yang kurang akan informasi mengenai politik dan kekuasaan (3) memahami mekanisme yang diberikan melalui media televisi, sosialisasi langsung dan simulasi oleh KPU Kota Pontianak, (4) mengendalikan dan mengontrol kekuasaan dengan cara memberikan pendidikan politik kepada anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara yang memiliki tugas mengendalikan dan mengontrol jalannya suatu pemilihan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti ekonomi, sikap apatis masyarakat, dan kampanye hitam menjadi tantangan KPU Kota Pontianak agar masyarakat tidak ikut kedalam pengaruh faktor tersebut sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Kata-kata Kunci : Pemilu Presiden, Strategi KPU, Partisipasi Pemilih

## Abstract

Research aims to understand Electoral Commission (KPU) strategy in presidential election 2014 to increase the participation of voters. This research uses the method descriptive with a qualitative approach. The theory used from Samuel P.Huntington and Joan M the concept of political participation as guidance in assessing the implementation of political participation given KPU Pontianak City. The research results show about strategy KPU Pontianak which are ( 1 ) increased capacity individual by means of socialization to several schools with a focus to voters novice, ( 2 ) understanding power leads to the people of marginal is residents under the jurisdiction of a correctional institution class II A Pontianak who lacking will information about politics and power ( 3 know the specified mechanism is through television, the socialization directly and simulation by KPU Pontianak City, ( 4 ) controlling and controlling authority by granting political education to members of the group a ballot has a duty control and control the running of a general election . The factors that affecting like economic , apathy the community , and black campaign is a challenge KPU Pontianak City that the public should not come into the influence of factors so the in the implementation of the elections and governance can run well .

*Keywords: presidential elections , KPU strategy, participation voters*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) sebagai sarana demokrasi telah digunakan disebagian banyak negara di dunia termasuk Indonesia, yang notabene memiliki masyarakat yang heterogen. Melalui Pemilu memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik.

Pemilu merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara maka masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara biasa dibagi menjadi dua, mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor penting dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan

kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Pengalaman pemilihan umum yang berlangsung dalam beberapa dekade menunjukkan banyaknya para pemilih yang tidak memberikan suaranya. Sebagai fenomena penggambaran diatas apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan “Bahwa yang dimaksud dengan pemilih adalah mereka yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah telah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu”.

Pemilih merupakan subjek dan objek dalam kegiatan politik, dalam kegiatan politik termasuk didalamnya adanya kegiatan Pemilu. Pemilih sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dalam orientasi kearah

pertumbuhan potensi dan kemampuannya kedepan dapat berperan dalam bidang politik. Mereka sebagai penerus bangsa perlu memiliki wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik termasuk kegiatan pemilihan umum agar mereka jangan sampai tidak berpartisipasi politik atau memilih golput pada pelaksanaan Pemilu.

Fenomena yang terjadi menjadi sebuah pertanyaan tentang apakah yang menyebabkan terjadinya ketidakpahaman tingkat partisipasi politik pemilih dan bentuk-bentuk partisipasi politik tersebut. Sebenarnya belum ada jawaban yang pasti terhadap pertanyaan tersebut, namun berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPU Kota Pontianak yang telah dilakukan tampak kecenderungan bahwa pengetahuan partisipasi politik para pemilih pemula tersebut dipengaruhi oleh faktor utama yaitu tingkat pendidikan dan pengetahuan soal politik. Kebanyakan partisipasi yang dilakukan pemilih tersebut hanya sebagai euphoria atau sebagai trend baru saja tanpa mengetahui makna sebenarnya dari pemilu tersebut.

## **2. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka didapat perumusan masalah sebagai berikut, yaitu : Bagaimana Strategi KPU Kota Pontianak dalam upaya meningkatkan partisipasi dan memberikan

pendidikan politik bagi Pemilih pada Pilpres 2014 ?.

## **3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini berada di Kota Pontianak mengingat kota ini merupakan pusat pemerintahan di Pontianak, dimana kantor-kantor pemerintahan sebagian besar berada di wilayah ini, Kota Pontianak juga merupakan pusat pendidikan dengan adanya sekolah-sekolah yang berdiri di wilayahnya, selain itu merupakan pusat perekonomian di Pontianak, akses prasarana yang sudah cukup baik dibandingkan kota lain, serta menurut pendataan profil kota sebagian besar masyarakat di kota ini memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Sehingga penulis berpikir seharusnya pemilih di kota ini juga memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi pula, sehingga seharusnya pemilih tidak memiliki hambatan untuk ikut pemilu dan cerdas sebagai pemilih. Namun pada kenyataannya masih ada para pemilih yang memiliki tingkat pengetahuan politik yang rendah. Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa perlu adanya sebuah penelitian dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam upaya meningkatkan partisipasi Pemilih pada Pemilihan Presiden 2014”.

#### 4. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menjelaskan Strategi KPU Kota Pontianak dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dan memberikan pendidikan politik pada Pilpres 2014.

- Peningkatan kinerja penyelenggara pemilu
- Lembaga penyelenggara pemilu bekerja sama dengan pihak eksternal.

#### 5. Manfaat Penelitian

Dapat memberikan pemahaman dan pengambilan kebijakan dalam usaha peningkatan partisipasi politik para Pemilih di Kota Pontianak, melalui proses perbaikan sosialisasi politik dan pendidikan politik pada masyarakat.

#### 2. Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Dalam perspektif berdemokrasi, tentunya sikap golput akan berimplikasi pada pembangunan kualitas demokrasi, sehingga perlu demokratisasi dalam menghadapi pesta demokrasi pada tanggal 9 April 2014.

### B. TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Strategi Partisipasi Politik

Strategi meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pilpres dapat ditempuh dengan berbagai metode menurut Budiardjo, 2002, yaitu:

- a. Pendidikan politik rakyat
- b. Fungsi partai politik
  - Sarana komunikasi politik
  - Sosialisasi politik
  - Sarana rekrutmen
  - Pengatur konflik
- c. Sosialisasi oleh penyelenggara Pemilu
  - Maksimalkan proses sosialisasi
  - Pendidikan bagi pemilih
  - Survei atau jejak pendapat

Sebagai konsekuensi negara demokrasi, Indonesia telah menyelenggarakan sepuluh kali pemilihan umum (Pemilu) yaitu Tahun 1955, 1971,

1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan 2009 untuk pemilihan calon legislatif (Pileg) dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden (Pilpres).

Miriam Budhiardjo (1982:12) mendefinisikan, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, ikut sosialisasi, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M (1977:3), partisipasi politik adalah aktivitas warga negara secara pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Partisipasi politik dapat bersifat individu ataupun kolektif, terorganisasi ataupun spontan, mapan, atau damai atau kekerasan, legal ataupun illegal, efektif atau tidak. Partisipasi politik juga bias berarti kegiatan mempengaruhi pemerintah, terlepas dari kegiatan secara langsung atau tidak. Langsung berarti ia sendiri tanpa perantara dan tidak langsung melalui orang-orang yang dapat

menyalurkan pemerintah. Biasanya partisipasi politik dipengaruhi oleh pertama, budaya politik masyarakat setempat. Ini terkait dengan beberapa nilai yang diyakini oleh masyarakat seperti nilai adat dan nilai tradisi, agama, dll. Kedua, partisipasi dipengaruhi juga oleh status sosial. Status sosial meliputi pendidikan, ekonomi, dan kelas sosial masyarakat.

Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan berpendapatan yang memadai lebih berpartisipasi dibandingkan orang yang berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Ketiga, partisipasi dipengaruhi juga oleh keterbukaan yang dilakukan pemerintah. Ini berkaitan dengan *political will* pemerintah untuk membuka ruang publik yang seluas-luasnya. Model-model partisipasi politik ada lima yaitu :

- a. Kegiatan pemilihan, berkaitan dengan setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil pemilihan.
- b. *Lobbying*, yaitu upaya yang dilakukan untuk menghubungi pejabat-pejabat dan pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan mengenai persoalan yang menyangkut sejumlah orang.
- c. Kegiatan organisasi, tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- d. Mencari koneksi, biasanya hanya bermanfaat pada sedikit orang.

e. Tindakan kekerasan, hal ini dilakukan sebagai upaya terakhir.

Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu tahun 2014 salah satu bagian dari UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, maka kegiatan partisipasi politik ini semakin terlihat dalam kehidupan masyarakat. Karena Pemilu merupakan salah satu produk demokrasi dan merupakan salah satu sarana pendidikan politik, dimana semua masyarakat dapat memberikan partisipasi politiknya. Sebagaimana dicatat oleh Profesor Miriam Budiardjo dalam bukunya "Demokrasi di Indonesia" Selain itu dengan dilaksanakannya pemilihan Presiden ini maka masyarakat dapat memberikan partisipasi politiknya secara individual. Sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan pemberian suara yang dapat dilakukan masyarakat dalam Pemilu. Masyarakat melakukan partisipasi politiknya antara lain dengan menjadi tim sukses calon Anggota Legislatif, saksi dalam pelaksanaan pemilihan, ikut dalam aktifitas kampanye pasangan calon.

Pemilu bukan satu satunya cara partisipasi. Hirarki Partisipasi Politik:

- Apati politik
- Memberikan suara pada saat pemilu
- Aktif diskusi politik
- Demonstrasi
- Ikut rapat umum partai/kampanye
- Anggota pasif organisasi quasi politik

- Anggota aktif organisasi quasi politik
- Anggota pasif Parpol
- Anggota aktif Parpol
- Mencari jabatan politik
- Menduduki Jabatan Politik

### 3. Gaya Partisipasi

Gaya mengacu kepada baik apa yang dilakukan maupun bagaimana ia melakukan sesuatu kegiatan. Seperti gaya pembicaraan politik (antara singkat dan bertele-tele), gaya umum partisipasi pun bervariasi. Adapun yang termasuk dalam gaya partisipasi sebagai berikut:

a. Langsung/perwakilan,

Orang yang melibatkan diri sendiri (actual) dengan hubungan yang dilakukan terus-menerus dengan figur politik dengan cara menelepon, mengirim surat, dan mengunjungi kantor pemerintah. Yang lain bertindak terhadap politikus, tetapi tidak bersama mereka, misalnya mereka memberikan suara untuk memilih pejabat pemerintah yang belum pernah dilihat atau ditemuinya

b. Kentara/tak kentara,

Seseorang mengutarakan opini politik, hal itu bisa meningkatkan kemungkinan diperolehnya keuntungan material (seperti jika mendukung seorang kandidat politik dengan imbalan diangkat untuk

menduduki jabatan dalam pemerintahan).

c. Individual/kolektif

Bahwa tekanan dalam sosialisasi masa kanak-kanak, terutama dalam kelas-kelas pertama sekolah dasar, adalah pada gaya partisipasi individual (memberikan suara, mengirim surat kepada pejabat, dsb). Bukan pada memasuki kelompok terorganisasi atau pada demonstrasi untuk memberikan tekanan kolektif kepada pembuatan kebijakan.

d. Sistematis/acak

Beberapa individu berpartisipasi dalam politik untuk mencapai tujuan tertentu, mereka bertindak bukan karena dorongan hati, melainkan berdasarkan perhitungan, pikiran, perasaan, dan usul mereka untuk melakukan sesuatu bersifat konsisten, tidak berkontradiksi, dan tindakan mereka kesinambungan dan teguh, bukan sewaktu-waktu atau dengan intensitas yang berubah-ubah.

e. Terbuka/Tersembunyi

Orang yang mengungkapkan opini politik dengan terang-terangan dan tanpa ragu-ragu, dan yang menggunakan berbagai alat yang dapat diamati untuk melakukannya, bergaya partisipasi terbuka.

f. Berkomitmen/ Tak berkomitmen

Warga negara berbeda-beda dalam intensitas partisipasi politiknya. Orang yang sangat mendukung tujuan, kandidat, kebijakan, atau program bertindak dengan semangat dan antusias; ciri yang tidak terdapat pada orang yang memandang pemilihan umum hanya sebagai memilih satu orang dengan orang lain yang tidak ada bedanya.

g. Derita/kesenangan

Seseorang bisa menaruh perhatian politik dan melibatkan deritanya karena kegiatan politik itu sendiri merupakan kegiatan yang menyenangkan. Yang lain ingin mencapai sesuatu yang lebih jauh dari politik melalui partisipasi.

#### 4. Motif Partisipasi

Berbagai faktor meningkatkan atau menekan partisipasi politik. Salah satu perangkat faktor itu menyangkut motif orang yang membuatnya ambil bagian. Motif-motif ini, seperti gaya partisipasi yang diberikannya berbeda-beda dalam beberapa hal sebagai berikut:

a. Sengaja/tak sengaja

Beberapa warga negara mencari informasi dan berhasrat menjadi berpengetahuan, mempengaruhi suara legislator, atau mengarahkan kebijaksanaan pejabat pemerintahan.

b. Rasional/emosional

Orang yang berhasrat mencapai tujuan tertentu, yang dengan teliti mempertimbangkan alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, dan kemudian memilih yang paling menguntungkan di pandang dari segi pengorbanan dan hasilnya disebut bermotivasi rasional.

c. Kebutuhan psikologis/sosial

Bahwa kadang-kadang orang memproyeksikan kebutuhan psikologis mereka pada objek-objek politik misalnya, dalam mendukung pemimpin politik karena kebutuhan yang mendalam untuk tunduk kepada autoritas, atau ketika memproyeksikan ketidacukupannya pada berbagai kelas "musuh" politik yang dipersepsi-minoritas, negara asing, atau politikus dari partai oposisi.

d. Diarahkan dari dalam/dari luar

Perbedaan partisipasi politik yang dengan motivasi batiniah dan motivasi sosial untuk berpartisipasi politik.

e. Berpikir/tanpa berpikir

Setiap orang berbeda dalam tingkat kesadarannya ketika menyusun tindakan politik. Perilaku yang dipikirkan meliputi interpretasi aktif dari tindakan seseorang dan perkiraan konsekuensi tindakan itu terhadap dirinya dan orang lain.

## 5. Pendidikan Politik

Di Indonesia, kepedulian terhadap hubungan pendidikan dan politik sudah

mulai berkembang dalam wacana publik. Walaupun belum menjadi satu bidang kajian akademik. Publikasi berbagai seminar ataupun diskusi yang mengangkat tema tentang pendidikan dan politik masih kurang terdengar. Andaiapun ada, fokus bahasannya belum begitu menyentuh aspek-aspek substantif hubungan politik dan pendidikan, hanya masih di seputar aspek-aspek ideologis politik pendidikan. Walaupun demikian, keyakinan akan adanya hubungan yang tak terpisahkan antara politik dan pendidikan sudah mulai terbentuk.

Mochtar Buchori (M. Shirozi, 2005:30) mengemukakan bahwa terdapat beberapa pemikiran yang mendukung mulai berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap hubungan antara pendidikan dan politik yaitu:

Pendidikan Politik, merupakan salah satu fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun juga baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, diktator dan sebagainya. Pendidikan politik, merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada warga negara dimana keterlaksanaannya sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu berada, selain itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalaman serta kepribadian seseorang. Disisi lain kegiatan ini juga dipandang

sebagai proses yang berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman politik yang relevan yang memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Pengetahuan, nilai dan sikap yang diperoleh seseorang itu membentuk satu layar persepsi, melalui mana individu menerima rangsangan politik yang akan menentukan bentuk etika politik seseorang yang berkembang berangsur-angsur.

Ada berbagai pendapat para ahli mengenai pendidikan politik, antara lain :

- a. Menurut Khoiron dkk (1999:4) Pendidikan politik pada hakikatnya adalah sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa, karena hal ini menyangkut relasi antar individu, atau individu dengan masyarakat di tengah medan sosial, dalam situasi-situasi konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan dan kemajemukan masyarakat.
- b. Begitu pula menurut Kartono (1996 : 64) Pendidikan politik adalah bentuk pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian agar menadang dalam perjuangan politik Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang internasional, di sengaja dan sistematis untuk membentuk inividu sadar

politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis atau moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

- c. Sementara, menurut Kantaprawira (1998:54) pendidikan politik adalah suatu upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.

Sesungguhnya pendidikan politik adalah sebuah proses dengan mana individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai dan sikap terhadap sistem politik masyarakat. Namun, peristiwa ini tidak menjamin bahwa masyarakat mengesahkan sistem politiknya, sekalipun hal ini mungkin bisa terjadi, sebab bisa saja menyebabkan pengingkaran terhadap legitimasi. Tetapi, apakah akan menuju kepada perubahan, tergantung keadaan yang menyebabkan pengingkaran. Apabila tidak ada legitimasi disertai dengan sikap bermusuhan yang aktif terhadap sistem politik, maka perubahan mungkin terjadi. Sebaliknya, jika legitimasi dibarengi dengan sikap apatis terhadap sistem politik, bukan tak mungkin menghasilkan perubahan.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Alfian (1986:235) dalam bukunya *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* bahwa Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan politik menurut Instruksi Presiden No. 12 tahun 1982 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Politik Generasi muda adalah sebagai berikut: Pendidikan politik merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses perubahan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien.

Dengan demikian pendidikan politik adalah proses penanaman nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, terencana dan berlangsung kontinyu dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka

membangun watak bangsa (*national character building*). Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila, tiada lain merupakan cerminan hati nurani dan sifat khas karakteristik bangsa, bukanlah nilai-nilai yang secara hakiki lahir pada saat kemerdekaan, melainkan telah tumbuh dan berkembang melalui proses sejarah yang panjang. Nilai ini berasal dari kodrat budaya dan menjadi milik seluruh rakyat. Hal ini tercermin dalam watak, kepribadian, sikap, dan tingkah laku bangsa.

Pendidikan politik merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana. Pelaksanaan pendidikan politik, harus berpegang teguh pada filsafah dan kepribadian bangsa Indonesia. Secara tidak langsung pendidikan politik merupakan bagian integral dari keseluruhan pembangunan bangsa yang dilaksanakan sesuai dengan landasan yang telah mendasari kehidupan bangsa Indonesia.

Berdasarkan Inpres No. 12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda (1982:13), maka yang menjadi landasan hukum pendidikan politik adalah sebagai berikut:

Landasan pendidikan politik di Indonesia terdiri dari:

- a. landasan ideologis, yaitu Pancasila

- b. landasan konstitusi, yaitu UUD 1945
- c. landasan operasional, yaitu GBHN
- d. landasan historis, yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945".

Landasan yang tersebut di atas merupakan landasan pokok pendidikan politik yang disertai landasan kesejarahan. Hal ini penting karena warga negara terutama siswa harus mengetahui sejarah perjuangan bangsa agar memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan 1945.

Fungsi pendidikan politik sangat penting sebab pendidikan politik meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang pada gilirannya akan mendorong timbulnya kesadaran politik secara maksimal dalam suatu sistem politik.

Merujuk pada beberapa pengertian pendidikan politik yang telah disebutkan sebelumnya, maka pendidikan politik mempunyai dua tujuan utama. Pertama, fungsi pendidikan politik adalah untuk mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politik yang dapat menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab. Kedua, fungsi pendidikan politik dalam arti yang lebih luas untuk membentuk suatu tatanan

masyarakat yang sesuai dengan tuntutan politik yang ingin diterapkan.

Inti dari pendidikan politik adalah mengenai bagaimana rakyat direkrut dan disosialisasikan. Jadi, fungsi dari pendidikan politik adalah untuk menjelaskan proses perekrutan dan upaya sosialisasi kepada rakyat untuk mengerti mengenai peranannya dalam sistem politik serta agar dapat memiliki orientasi kepada sistem politik.

Fungsi yang disampaikan di atas lebih menonjolkan fungsi pendidikan politik dalam mengubah tatanan masyarakat yang ada menjadi lebih baik dan lebih mendukung tercapainya proses demokrasi. Sedangkan fungsi pendidikan politik bagi individu antara lain adalah:

- 1) peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit social dan kedurjanaaan.
- 2) di samping mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat.

Fungsi pendidikan politik bagi individu yang tertera di atas tidak hanya mengubah individu tapi juga membentuk individu yang baru. Dalam artian bahwa

seseorang individu dengan melalui pendidikan politik tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang politik tapi juga mempunyai kesadaran dan sensitifitas dalam berpolitik yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan yaitu dengan ikut berpartisipasi atau ditunjukkan dengan sikap dan perilaku politik yang lebih luas dalam usahanya untuk mencapai tujuan politik.

Sampai saat ini, realitas pendidikan politik Indonesia masih belum sepenuhnya merdeka. Hal ini bisa dilihat dari komitmen pemerintah yang masih rendah dalam mewujudkan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang bebas biaya, belum terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20%, kurangnya penghargaan terhadap profesionalisme dan kesejahteraan guru, rendahnya mutu dan daya saing pendidikan, upaya otonomi pendidikan yang masih setengah hati, dan sebagainya. Padahal pemerintah sebetulnya telah menetapkan Renstra Pendidikan tahun 2010–2014 dengan tiga sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai, yaitu meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dan meningkatkan tata pemerintahan (*governance*), akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Merujuk pada beberapa pengertian pendidikan politik yang telah disebutkan

sebelumnya, maka pendidikan politik mempunyai dua tujuan utama. Pertama, fungsi pendidikan politik adalah untuk mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politik yang dapat menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab. Kedua, fungsi pendidikan politik dalam arti yang lebih luas untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan tuntutan politik yang ingin diterapkan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peran pendidikan politik sangat diharapkan untuk membentuk karakter dan mental generasi muda untuk dapat melakukan transformasi budaya dalam upaya membina sistem dan kondisi politik yang kondusif. Suatu tuntutan yang pada hakekatnya telah digariskan oleh para pendiri Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional, dengan mengedepankan budaya dan etika politik yang patut dibanggakan.

Pokok-pokok materi pendidikan politik sepenuhnya tertuang sebagai muatan yang terkandung dalam kurikulum pendidikan politik. Kurikulum pendidikan politik adalah jarak yang harus ditempuh oleh seorang siswa dalam mencapai target yaitu melek politik yang ditandai dengan menguatnya daya nalar terhadap berbagai aktifitas politik dalam infrastruktur maupun suprastruktur politik

Kurikulum pendidikan politik yang dicanangkan oleh Robert Brownhill di atas telah cukup lengkap. Seperti kita lihat, Brownhill tidak hanya memasukkan unsur materi politik namun juga terdapat unsur etika, ketaatan pada hukum dan kekuasaan, pemahaman terhadap jalannya pemerintahan dan pembuatan kebijakan, serta masalah ekonomi dan sejarah.

Hal-hal yang mengenai kurikulum pendidikan politik diatur dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyebutkan bahwa bahan pendidikan politik antara lain:

- a. penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara,
- b. kehidupan dan kerukunan hidup beragama;
- c. motivasi berprestasi;
- d. pengamalan kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia;
- e. pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik;
- f. disiplin pribadi, sosial, dan nasional;
- g. kepercayaan pada pemerintah;
- h. kepercayaan pada pembangunan yang berkesinambungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa terdapat satu materi yang membedakan kurikulum pendidikan politik menurut Brownhill dengan bahan kurikulum pendidikan politik di Indonesia. Dalam kurikulum pendidikan politik di Indonesia, telah memasukkan unsur materi agama yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam bahan pendidikan politik.

Bahan pendidikan politik di Indonesia harus bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan berbagai makna yang dipetik dari perjuangan bangsa Indonesia. Semua bahan ajar pendidikan politik tersebut telah tercakup dalam mata pelajaran PKn.

## **6. Faktor – faktor yang menyebabkan keberhasilan Pendidikan Politik**

Menurut Alfian (1986:82) ada dua faktor yang menyebabkan keberhasilan pendidikan politik yaitu, (1) Faktor peningkatan kesadaran politik masyarakat, khususnya pada generasi muda dan (2) peningkatan partisipasi politik, yang merupakan hasil kesadaran politik yang tinggi dari masyarakat. Partisipasi politik yang meningkat mempunyai aspek yang positif berupa semakin meningkatnya dukungan pada penyelenggara pemerintahan dalam keberhasilan pendidikan politik.

Begitu pula menurut Rusadi Kantaprawira (1998:56) bahwa keberhasilan politik juga dapat dilihat antara lain melalui:

- a. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.
- b. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media).
- c. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.

## 7. Luas Partisipasi Politik

Luas partisipasi politik dipengaruhi oleh tingkat kemajuan bangsa, sistem politik yang dianut, masalah komunikasi, tingkat melek huruf ( literasi ). Menurut Myron Weiner (1980:27), paling tidak terdapat lima hal yang dapat menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik, yaitu:

### a. Modernisasi

Sejalan dengan berkembangnya industrialisasi, perbaikan pendidikan dan media komunikasi massa, maka pada sebagian penduduk yang merasakan terjadinya perubahan nasib akan menuntut berperan dalam politik

### b. Perubahan-Perubahan Struktur Kelas Sosial

Salah satu dampak modernisasi adalah munculnya kelas pekerja baru dan kelas menengah yang semakin meluas, sehingga mereka merasa berkepentingan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik.

### c. Pengaruh Kaum Intelektual dan Komunikasi Massa Modern

Kaum intelektual (sarjana, pengarang, wartawan, dan sebagainya) melalui ide-idenya kepada masyarakat umum dapat membangkitkan tuntutan akan partisipasi masa dalam pembuatan keputusan politik. Demikian juga berkembangnya sarana transportasi dan komunikasi modern mampu mempercepat penyebaran ide-ide baru.

### d. Konflik di antara Kelompok-Kelompok Pemimpin Politik

Para pemimpin politik bersaing memperebutkan kekuasaan. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah dalam rangka mencari dukungan rakyat. Berbagai upaya yang mereka lakukan untuk memperjuangkan ide-ide partisipasi massa dapat menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar hak-hak rakyat yang berpartisipasi itu terpenuhi.

### e. Keterlibatan Pemerintah yang Meluas dalam Urusan Sosial Ekonomi dan Kebudayaan

Perluasan kegiatan pemerintah dalam berbagai bidang menimbulkan akibat adanya tindakan-tindakan yang semakin menyusup ke segala segi kehidupan rakyat. Ruang lingkup tindakan atau kegiatan atau tindakan pemerintah yang semakin luas mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

### **8. Kategori Pemilih**

Pemilih di Negara Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) kategori. Pertama, pemilih yang rasional, yaitu pemilih yang memilih berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Yang kedua, pemilih kritis emosional, yaitu pemilih yang idealis dan tidak kenal kompromi. Dan ketiga, pemilih pemula, yaitu pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih (<http://www.research.wordpress.com>).

Menurut pasal 1 ayat (22) UU No. 10 tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara

telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih adalah warga negara yang telah didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan mengikuti pemilu (memberikan hak suara) pada pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-51 tahun.

Dari definisi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pemilih pemula yaitu sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia dan pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
- b. Sudah mengikuti pemilu (memberikan hak suara) pada pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-51 tahun.
- c. Mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pemilu.

### **9. Masalah Dalam Kegiatan Partisipasi Politik**

Dalam pelaksanaan kegiatan partisipasi politik, tentunya tidak selamanya berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, diantaranya masyarakat yang enggan menghadiri kegiatan politik (kampanye), tidak hadir dalam kegiatan

pemilihan umum dan tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Namun demikian, masalah yang sering terjadi dalam kegiatan partisipasi politik dewasa ini adalah semakin menurunnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya (golput).

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Sehingga dengan metode ini dapat mendeskripsikan serta menganalisa Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam upaya meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Presiden 2014.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pontianak. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Oktober 2014 sampai dengan Maret 2015. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dan masyarakat pemilih. Sedangkan objek penelitiannya adalah Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan presiden 2014 di kota Pontianak.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan wawancara, dan

dokumentasi dengan menggunakan instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri dibantu pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, pengorganisasian data, dan interpretasi daya. Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang peneliti gunakan adalah triangulasi data.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. **Peningkatan kemampuan individual dengan cara sosialisasi ke beberapa sekolah dengan fokus kepada pemilih pemula.**

Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negaranya. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

Sebagai bentuk tanggung jawab KPU Kota Pontianak dalam mensukseskan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dalam bentuk sosialisasi sebagai berikut :

KPU Kota Pontianak telah membentuk Relawan Demokrasi yang di tuangkan dalam Keputusan KPU Kota Pontianak Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-019.435761/TAHUN 2014 yang terbagi dalam lima segmen, masing-masing segmen terdiri dari 5 orang :

- Segmen Pemilih Pemula;
- Segmen Agama
- Segmen Perempuan;
- Segmen Disabilitas;
- Segmen Marginal.

Relawan Demokrasi yang dibentuk bertugas untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi keliling (*mobile*) berbagai bentuk/macam dimasing-masing kelompok-kelompok baik itu disekolah-sekolah, perguruan tinggi, perkumpulan agama, Lapas dan lain-lain.

## **2. Pemahaman kekuasaan mengarah kepada kaum marginal yakni Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pontianak**

Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program, dan jadwal, hasil pemilu, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tujuan sosialisasi yaitu :

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan warga binaan akan pentingnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
- b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan warga binaan tentang program, tahapan, jadwal, dan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan warga binaan tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Meningkatkan kesadaran warga binaan untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## **3. Memahami mekanisme yang diberikan melalui media televisi,**

## **sosialisasi langsung dan simulasi oleh KPU Kota Pontianak**

Pendidikan politik dapat dikatakan sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat warga negara menjadi lebih melek politik. Warga negara yang melek politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap proses pembangunan. Pendidikan politik diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik generasi muda saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa.

Survey atau jejak pendapat dan penghitungan cepat yang kini banyak mendapatkan sorotan publik terkait dengan integritas pelaksanaannya. Banyak anggapan bahwa survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dilakukan hanya untuk kepentingan profit saja. Namun, di satu sisi, perlu diperhatikan bahwa keberadaan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat sangatlah penting. Kegiatan tersebut juga bisa dijadikan sebuah sarana untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Untuk itu, kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat perlu mendapatkan dukungan, karena kegiatan tersebut

merupakan sarana yang tentu saja bukan hanya ditujukan untuk menghitung atau profit saja, namun lebih dari itu, ada proses pendidikan bagi para pemilih serta informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.

### **4. Mengendalikan dan mengontrol kekuasaan dengan cara memberikan pendidikan politik kepada anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara.**

Lembaga penyelenggara pemilu bekerjasama yang berkesinambungan dengan lembaga pendidikan, Ormas, LSM untuk terus mengadakan sosialisasi dan pendidikan politik kepada semua level masyarakat. Karena selama ini kerjasama tersebut bersifat momentum menjelang pemilihan sehingga kerjasama tersebut hanya bersifat sosialisasi yang tidak menyentuh keakar rumput.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **a) Kesimpulan**

Partisipasi Politik merupakan salah satu kegiatan kenegaraan warga negara dalam kegiatan politik. Partisipasi politik tersebut juga merupakan hak warga negara, jadi sudah sewajarnya seorang warga negara menggunakan hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator

implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Strategi yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Pontianak dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pilpres tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Melakukan Pendidikan politik untuk masyarakat seperti:

1. Sosialisasi tentang pilpres 2014 ke berbagai kalangan masyarakat  
Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Pontianak tentang pilpres 2014 dibuat secara luas ke berbagai tempat berkumpulnya masyarakat, seperti dipusat keramaian, di car free day, di sekolah-sekolah, di pasar, dsb.
2. Membuat seminar tentang pentingnya partisipasi politik kepada masyarakat  
Seminar yang dibuat oleh KPU Kota Pontianak tentang pentingnya memberikan hak suara dalam pilpres 2014 di sekolah-sekolah. Seperti seminar.
3. Membentuk relawan demokrasi  
Relawan Demokrasi yang dibentuk bertugas untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi keliling (*mobile*) berbagai bentuk/macam dimasing-masing kelompok-kelompok baik itu disekolah-sekolah, perguruan tinggi, perkumpulan agama, Lapas dan lain-

lain. Selain membentuk Relawan Demokrasi, KPU Kota Pontianak menyebarluaskan informasi melalui tatap muka, media surat kabar, radio, spanduk, leaflet, stiker, baliho yang tersebar di seluruh Kota Pontianak, agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui pelaksanaan pemilu pada tahun 2014 Pemilihan Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD.

#### **b) SARAN**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan agar setidaknya dapat mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu:

1. KPU Kota Pontianak perlu membuat penjelasan tentang pendidikan politik yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat awam, terutama kalangan bawah.
2. KPU Kota Pontianak juga perlu memberikan pengetahuan politik kepada para pegawai dengan tujuan bisa menjadi salah satu agen KPU Kota Pontianak dalam menyampaikan pengetahuan pendidikan politik bagi masyarakat guna menyukseskan strategi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

#### **F. DAFTAR PUSTAKA**

## 1. Buku-Buku

Alfian, 1992. *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta :GramediaPustakaUtama.

Alfian, 1986. *Pembangunan Politik Indonesia*. Jakarta :Gramedia Pustaka Utama.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*.

Budiardjo, Miriam. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Gramedia.

Dalton, Russel J. dan Martin P. Wattenberg. 1993. *Political Science : The State of The Discipline*. Washington: American Political Science Association.

Iskandar, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta :Referensi Jurnal Tata Loka. Semarang: Planologi UNDIP

*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua*. 1996. Jakarta :Balai Pustaka 3685.

Kantaprawira,Rusadi 1998, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, Bandung : CV Sinar Baru.

Kartono, Kartini 1996, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, Bandung :Mandar Maju.

Khoiron, M. Nur. 1999. *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara (Tawaran Operasional dan Kerangka Kerja)*. IKIS: Yogyakarta.

Moleong, Lexy, J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rajawali Rosda Karya.

Robert P. Clark. 1989. *Menguak Kekuasaan dan Politik di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson. 1977. *No Easy Choie: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Cetakan ke-11. Bandung : ALFABETA

Syarbaini,Syahrial,Dkk. 2002. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta :Ghalia Indonesia.

Weiner, Myron.1980. *Modernisasi: Dinamika Pertumbuhan*. Yogyakarta: GadjahMada University Press.

## 2. Dokumen-Dokumen

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang No. 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014

Peraturan KPU No.21 tahun 2013 tentang Program dan jadwal penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014.

Peraturan KPU No.23 tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat tdalam Penyelenggaraan Pemilu



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Ardian  
 NIM / Periode lulus : E02110028 /  
 Tanggal Lulus : 15 Januari 2016  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi / Ilmu politik  
 E-mail address/ HP : ardian\_sidik@gmail.com / 089693903539

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif.kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Aspirasi.....\*) pada Program Studi Ilmu Politik..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak dalam upaya meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Presiden 2014 di Kota Pontianak.....

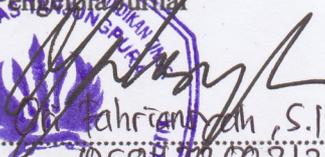
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara fulltex
- content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui  
 Pengelola Jurnal  
  
 NIP. 1969011200212102

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 25 Februari 2016  
  
 NIM. E02110028

\*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)